

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH**



RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2022



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
38. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 60);
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam:

- | | |
|----------------|---|
| Lampiran I | : Dinas Pendidikan |
| Lampiran II | : Dinas Kesehatan |
| Lampiran III | : RSUD Datu Sanggul |
| Lampiran IV | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang |
| Lampiran V | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan |
| Lampiran VI | : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran |
| Lampiran VII | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Lampiran VIII | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Lampiran IX | : Dinas Sosial |
| Lampiran X | : Dinas Tenaga Kerja |
| Lampiran XI | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak |
| Lampiran XII | : Dinas Ketahanan Pangan |
| Lampiran XIII | : Dinas Lingkungan Hidup |
| Lampiran XIV | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Lampiran XV | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Lampiran XVI | : Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana |
| Lampiran XVII | : Dinas Perhubungan |
| Lampiran XVIII | : Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Lampiran XIX | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu |
| Lampiran XX | : Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Lampiran XXI | : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Lampiran XXII | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

Lampiran	XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran	XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran	XXV	: Dinas Perdagangan
Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021
BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan yang baik. Kecamatan Tapin Tengah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2021 maka perlu dilakukan Perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan
2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument kegiatan yang sangat

penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain Perubahan Rencana Kerja yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan 2022 adalah sebagai pedoman pedoman arah kerja bagi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Kebijakan, program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, provinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin dan Renstra Kecamatan Tapin Tengah;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja.

C. Dasar Pertimbangan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin 2018-2023;
 10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021, tanggal 02 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2022;

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2022 ;dan
12. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 050 / 188– Randal / Bappelitbang / 2022 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. DASAR PERTIMBANGAN
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH

- A. KEGIATAN LANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA
- B. PERGESERAN DAN PENGHAPUSAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagaimana terdapat pada table berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87	Belum diukur
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	Belum diukur
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	50%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	100%	50%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%	50%

Pengukuran kinerja pada sasaran nomor satu dilakukan pada akhir tahun 2022 yaitu pada triwulan IV, oleh karena pengukuran kinerja terkait Kepuasan Masyarakat dilakukan satu kali dalam setahun

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut / Tabel Monev :

Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tapin Tengah sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebagian besar terlaksana sesuai dengan Output (keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerja renja sampai dengan triwulan II ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yg baru akan dilaksanakan setelah Triwulan II pada tahun berjalan sesuai dengan perencanaan yg telah disusun oleh pelaksana kegiatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH

Program/kegiatan dan kebutuhan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai dengan prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pasal 99 ayat (2) menyebutkan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk Tahun 2022 tidak ada penghapusan kegiatan, hanya ada penambahan anggaran di beberapa kegiatan tergantung kebutuhan sampai akhir tahun anggaran. Serta beberapa kegiatan yang dikurangi besaran anggarannya dan ditambahkan ke kegiatan lain yang memerlukan tambahan anggaran (pergeseran). Serta ada tambahan dana yaitu Kegiatan Pendataan Perkembangan Kependudukan Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022. Pergeseran dan Perubahan kegiatan secara rinci atau Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada perubahan renja SKPD Kantor Kecamatan Tapin Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TAPIN**

Nama SKPD : Kecamatan Tapin Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2022										Perkiraan Maju Tahun 2023		Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif				
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum					Sesudah	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Kecamatan Tapin Tengah									2.971.705.968	3.252.305.968	280.600.000				3.414.921.266			
7	UNSUB																		
7.1	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																		
7.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan 2. Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD 3. Waktu Penyediaan Komponen Instalasi 4. Waktu Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6. Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jumlah Penyusunan laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD 3. Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Waktu Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6. Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					1. 13 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 12 Bulan 4. 12 Bulan 5. 12 Bulan 6. 12 Bulan	1. 13 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 12 Bulan 4. 12 Bulan 5. 12 Bulan 6. 12 Bulan			2.784.415.968	3.065.015.968	280.600.000			3.218.266.766		
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan	1. 12 bulan	9.850.000	9.850.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	10.342.500		Kecamatan Tapin Tengah	
7.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	9.850.000	9.850.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	10.342.500		Kecamatan Tapin Tengah	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan			1.934.642.968	1.934.642.968	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan	2.031.375.116	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Terlaksananya Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	1.926.017.968	1.926.017.968	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	2.022.318.866		Kecamatan Tapin Tengah	
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	3.675.000	3.675.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	3.858.750		Kecamatan Tapin Tengah	
7.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	4.950.000	4.950.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	5.197.500		Kecamatan Tapin Tengah	

7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu 6. terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu 6. terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	393.131.700	435.481.700	42.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan 4. 12bulan 5. 12bulan 6. 12bulan	457.255.785	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	5.106.600	5.106.600	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	5.361.930	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	37.285.900	40.285.900	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	42.300.195	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	49.266.300	49.266.300	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	51.729.615	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	10.320.900	11.320.900	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	11.886.945	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	2.475.000	2.475.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	2.598.750	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	288.677.000	327.027.000	38.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	343.378.350	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Millik Daerah Penunjang	1. terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan	1. 12 bulan	297.613.400	347.613.400	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	364.994.070	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	297.613.400	347.613.400	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	364.994.070	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	108.122.400	92.722.400	(-15.400.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan	97.358.520	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	1.322.400	1.922.400	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	2.018.520	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	34.800.000	18.800.000	(-16.000.000)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	19.740.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	72.000.000	72.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	75.600.000	Kecamatan Tapin Tengah

7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan 3. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan	41.055.500	244.705.500	203.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan	256.940.775	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	32.865.500	32.865.500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	34.508.775	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan	1. Terlaksananya Pemeliharaan	1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	8.190.000	11.840.000	3.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	12.432.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1. Terlaksananya Pemeliharaan	1. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	0	200.000.000	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	210.000.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.2	Program Penyelenggaraan	1. Waktu Penyediaan Jasa	1. Waktu Penyediaan Jasa Petugas E-KTP					1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	52.200.000	52.200.000	0				54.810.000	
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1. Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di 2. Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	1. Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2. Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 Bulan	1. 12 bulan 2. 12 Bulan	52.200.000	52.200.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan	54.810.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	1. Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	1. Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	52.200.000	52.200.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	54.810.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di		1. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	0	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Jumlah Koordinasi penguatan 2. Waktu Koordinasi Kegiatan 3. Waktu Peningkatan Pemberdayaan 4. Waktu Peningkatan Pemberdayaan 5. Jumlah Koordinasi ketentraman dan	1. Jumlah Koordinasi penguatan ekonomi masyarakat 2. Waktu Koordinasi Kegiatan Keagamaan 3. Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 4. Waktu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 5. Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat					1. 1 Kegiatan 2. 12 Bulan 3. 12 Bulan 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan	1. 1 Kegiatan 2. 12 Bulan 3. 12 Bulan 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan	48.498.000	48.498.000	0				50.922.900	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan	35.598.000	35.598.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan	37.377.900	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	1. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	5.960.000	5.960.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	6.258.000	Kecamatan Tapin Tengah

7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	1. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	1. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	29.638.000	29.638.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	31.119.900	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1. terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan	1. 12 bulan	12.900.000	12.900.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	13.545.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	12.900.000	12.900.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	13.545.000	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan	1. Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari	1. Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional					1. 1 Kegiatan	1. 1 Kegiatan	34.792.000	34.792.000	0				36.531.600	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perugasan Kepala Daerah	1. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ke	1. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keu	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan	1. 12 bulan	34.792.000	34.792.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan	36.531.600	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	1. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	1. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ke	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	34.792.000	34.792.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	36.531.600	Kecamatan Tapin Tengah
7.1.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan 2. Jumlah Koordinasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat 3. Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa 4. Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana	1. Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan 2. Jumlah Koordinasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat 3. Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa 4. Jumlah Koordinasi Pengawasan Dana Desa					1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 9 Kegiatan 4. 12 Bulan	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 9 Kegiatan 4. 12 Bulan	51.800.000	51.800.000	0				54.390.000	
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2. terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan 3. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2. terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	51.800.000	51.800.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12bulan 2. 12bulan 3. 12bulan 4. 12bulan 5. 12bulan 6. 12bulan	54.390.000	Kecamatan Tapin Tengah

7.1.6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	1. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	6.000.000	6.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	6.300.000		Kecamatan Tapin Tengah
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	6.000.000	6.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	6.300.000		Kecamatan Tapin Tengah
7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	7.300.000	7.300.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	7.665.000		Kecamatan Tapin Tengah
7.1.6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata	1. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata	1. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata Desa	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	6.000.000	6.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	6.300.000		Kecamatan Tapin Tengah
7.1.6.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	1. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	1. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	11.500.000	11.500.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	12.075.000		Kecamatan Tapin Tengah
7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Masyarakat, Semua ASN	Masyarakat, Semua ASN	Kab. Tapin	Kab. Tapin	1. 12 Bulan	1. 12 Bulan	15.000.000	15.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. 12Bulan	15.750.000		Kecamatan Tapin Tengah

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tapin Tengah, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tapin Tengah ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.

BUPATI TAPIN,

Drs. H. M. ARIFIN ARFAN, MM